



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Jambi Tahun 2014 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi dokumen laporan kinerja tahunan berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Dengan disusunnya LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 ini, diharapkan bermanfaat untuk :

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Jambi lebih akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Provinsi Jambi terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah.

1.2. Kedudukan & Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Penetapan Undang-Undang



Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu seorang Wakil Gubernur. Asas penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri dari atas : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas.

1.3. Kondisi Geografis Daerah

1.3.1. Letak Wilayah dan Topografi

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0°45' sampai 2°45' lintang selatan dan antara 1010°10' sampai 1040°55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.

Gambar 1.1. Peta Provinsi Jambi



Luas Wilayah Provinsi Jambi sebesar 53.435 Km² dengan luas daratan 50.160,05 Km² dan luas perairan sebesar 3.274,95 Km² terdiri dari :

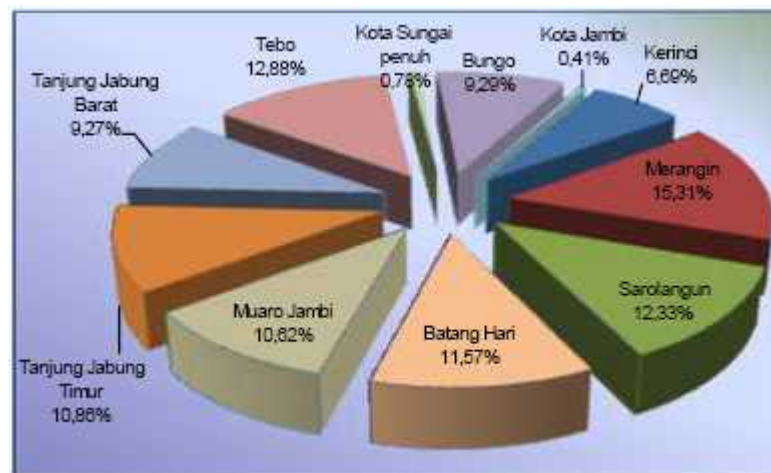
1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km² (6,69%)
2. Kabupaten Merangin 7.679 Km² (15,31%)
3. Kabupaten Sarolangun 6.184 Km² (12,33%)
4. Kabupaten Batanghari 5.804 Km² (11,57%)
5. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km² (10,62%)
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445 Km² (10,86%)
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4.649,85 Km² (9,27%)
8. Kabupaten Tebo 6.461 Km² (12,88%)
9. Kabupaten Bungo 4.659 Km² (9,29%)
10. Kota Jambi 205,43 Km² (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,78%)

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.679 Km² atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten



Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.461 Km² dan 6.184 Km². Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2013 sebanyak 138 kecamatan dan 1.553 desa/kelurahan, dimana jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Merangin yaitu 24 kecamatan, sedangkan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci yaitu 287 desa/kelurahan.

Gambar 1.2. Persentase Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota



(Sumber : BPS Provinsi, Jambi dalam angka 2014)

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian, yakni :

- 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin ;
- 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan
- 3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

1.3.2. Klimatologi

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Sepanjang tahun 2014, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan pada tahun 2014 mencapai 2.609,3mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 3,0 jam perhari dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 86,0%. Suhu udara rata-rata maksimum mencapai 31,6°C, sedangkan rata-rata minimum mencapai mencapai 23,6°C.

1.3.3. Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya



diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan)
- b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi. Adapun kawasan-kawasan strategis yang berada di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
2. Kawasan strategis Metropolitan Jambi dan sekitarnya.
3. Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
4. Kawasan strategis Bungo - Tebo
5. Kawasan strategis Merangin - Sarolangun
6. Kawasan strategis Sungai Penuh dan sekitarnya

Berdasarkan penunjukan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999, dimana kawasan hutan Provinsi Jambi meliputi luas $\pm$ 2.179.440,00 Ha atau 42,73% dari keseluruhan luas Provinsi Jambi. Adapun luasan tersebut sesuai dengan pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 30.400,00 Ha (1,39%), Taman Nasional 608.630,00 Ha (27,92%), Taman Hutan Raya 36.660,00 Ha (1,68%), Hutan Wisata Alam 430,00 Ha (0,02%), Hutan Lindung 191.130,00 Ha (8,77%), Hutan Produksi Terbatas 340.700,00 Ha (15,63%), Hutan Produksi Tetap 971.490,00 Ha (44,57%).

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasen, longsoran, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang berada pada Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

1.3.4. Kondisi Demografi

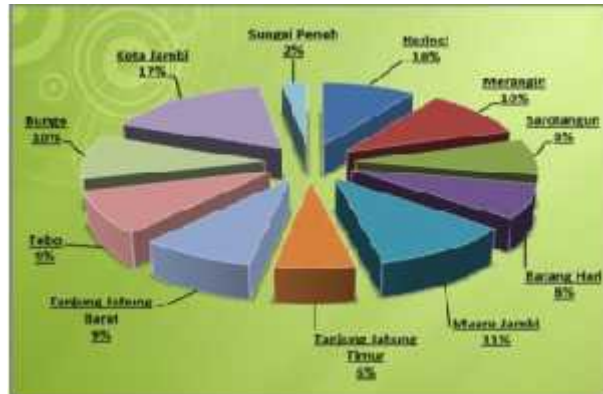
1.3.4.1. Penduduk

Berdasarkan Jambi Dalam Angka Tahun 2014, Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2013 sebanyak 3.317.034 jiwa, pada tahun 2012 sebanyak 3.242.814. Selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 2,29 persen. Kepadatan penduduk tahun 2013 menurut Kabupaten/Kota :



1. Kabupaten Kerinci 97 orang/km²
2. Kabupaten Merangin 47 orang/km²
3. Kabupaten Sarolangun 43 orang/km²
4. Kabupaten Batanghari 44 orang/km²
5. Kabupaten Muaro Jambi 71 orang/km²
6. Kabupaten Tanjab Timur 39 orang/km²
7. Kabupaten Tanjab Barat 65 orang/km²
8. Kabupaten Tebo 50 orang/km²
9. Kabupaten Bungo 71 orang/km²
10. Kota Jambi 2.771 orang/km²
11. Kota Sungai Penuh 217 orang/km²

Gambar 1.3. Persentase Jumlah Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota



Sumber : BPS Provinsi Jambi, Jambi Dalam Angka 2014

1.4. Potensi Unggulan Daerah

Provinsi Jambi terletak di tengah

Pulau Sumatera merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya alam yang mempunyai potensi cukup besar tersebut antara lain; perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Untuk sektor bahan pertambangan dan penggalian yang menjadi potensi unggulan daerah adalah batu bara, gas bumi, minyak, tambang mineral lainnya. Sedangkan potensi industri pengolahan di Provinsi Jambi yang potensial untuk dikembangkan terutama untuk pengolahan dengan bahan baku (*crude palm oil*), *crumb rubber*, *virgin coconut oil (vico)*, *cassia vera*, serta olahan dari produk tanaman pangan dan produk dari ikan.

Bila dilihat dari Komoditi unggulan Provinsi Jambi, maka terdapat 12 komoditi unggulan yang didominasi dari berbagai sub-sektor pertanian antara lain: Karet, Kelapa sawit, Kelapa dalam, Cassievera, Kopi, Buah-buahan, Pinang, Nenas, Perikanan Laut dan darat dan Peternakan serta hasil pertambangan umum lainnya.

1.5. Kondisi Ekonomi Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pendapatan Daerah pada tahun 2014 memperlihatkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan daerah sebesar 103,09 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.127.131.786.586,67 terealisasi sebesar Rp. 3.223.628.749.270,97. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi meningkat sebesar 11,69 % yaitu dari realisasi Rp. 2.886.263.091.626,10 pada tahun 2013, menjadi Rp. 3.223.628.749.270,97 pada realisasi pendapatan daerah tahun 2014. Peningkatan pendapatan tahun 2014 tersebut, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar 110,82 persen atau melampaui target sebesar Rp. 130.749.074.697,30 dari target yang ditetapkan Rp. 1.208.837.984.507,67. Untuk pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 1.514.839.878.066,00 dari target Rp. 1.556.188.248.079,00 atau 97,34 %, sementara untuk pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah realisasinya mencapai 101,96 persen dari target yang telah



ditetapkan sebesar Rp. 362.105.554.000,00 atau melampaui target sebesar Rp. 7.096.258.000,00.

Dari total Pendapatan Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2014 yang mencapai Rp. 3.223.628.749.270,97, terlihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 41,56 % atau sebesar Rp. 1.339.587.059.204,97 dan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebesar 46,99 % atau sebesar Rp. 1.514.839.878.066,00 sedangkan pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 11,45 persen atau sebesar Rp. 369.201.812.000,00.

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2014 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya berbagai penghematan dari sisi belanja dan pembiayaan.

1.5.1. Kondisi Belanja Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana.

Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

1.5.2. Target dan Realisasi Belanja

Program Prioritas Pembangunan tahun anggaran 2014 sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya yang dijabarkan dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2014 dengan mengalokasikan anggaran secara proporsional kepada seluruh SKPD dengan satuan standar tertinggi. Alokasi target belanja daerah tahun 2014 sebesar Rp. 1,8 Triliun yang merupakan belanja langsung, dan 1,4 Triliun untuk belanja tidak langsung. Dari target belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 1.704.403.425.151,07 dengan tingkat capaian realisasi belanja daerah tahun 2014 sebesar 89,66% dari target yang telah ditetapkan yakni 99,8%.

Tidak tercapainya target belanja tahun 2014 karena adanya kegiatan pada SKPD yang tidak dapat dilaksanakan sesuai target serta adanya keterbatasan waktu serta efisiensi dari berbagai pengeluaran namun tetap mengedepankan capaian target kinerja masing-masing program/kegiatan yang telah ditetapkan.

1.5.3. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota serta belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 1,4 Triliun dan terealisasi sebesar Rp. 1.3 Triliun atau 94,01% lebih tinggi dari rencana anggaran.



Belanja Pegawai yang merupakan belanja gaji pegawai selama tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 434.867.287.415,00 atau 90,23% dari jumlah anggaran, belanja ini lebih kecil 5,6% dari realisasi tahun sebelumnya.

Belanja Subsidi tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari jumlah anggaran, belanja subsidi ini mengalami tidak mengalami peningkatan dari total realisasi tahun lalu.

Belanja Hibah tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 1 Milyar,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,29 Milyar,- atau terealisasi sebesar 100,18%. Belanja bantuan sosial pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 341,4 Milyar,- dan terealisasi sebesar Rp. 345,5 Milyar atau sebesar 116,25%, penganggaran belanja bantuan sosial ini lebih besar dari tahun 2013.

Belanja bagi hasil tahun 2014 kepada pemerintah Provinsi / Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp. 558,4 Milyar dan telah terealisasi sebesar Rp. 517,1 Milyar,- atau sebesar 92,6%, Alokasi belanja ini lebih besar dari tahun 2013.

Belanja bagi hasil ini merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota yang terdiri dari belanja bagi hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB, Belanja Bagi Hasil Pajak Air permukaan, Belanja Bagi Hasil Pajak Air Bawah Tanah, Belanja Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air dan bagi hasil BBN Kendaraan di atas Air.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa tahun 2014 sebesar Rp. 157.225.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 150.386.797.280,- atau 95,65% yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Sungai Penuh, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.087.471.900,- atau sebesar 69,58%.

1.5.4. Belanja Langsung

Komponen utama Belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang merupakan cerminan pelaksanaan kebijakan program pembangunan tahunan dan tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang ditetapkan setiap tahunnya. Komposisi penyediaan anggaran belanja langsung 60% dari total belanja daerah, hal ini mencerminkan bahwa struktur APBD Provinsi Jambi memberikan porsi yang cukup besar untuk pembangunan daerah.

Penyediaan anggaran belanja langsung tahun 2014 lebih tinggi dari anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar 60,05%, dan 56,13% pada tahun 2013 dari total belanja daerah, yang dialokasikan untuk Belanja pegawai sebesar Rp. 300.336.655.113,- atau terealisasi sebesar 87,56%, belanja barang dan jasa disediakan anggaran sebesar Rp. 702.495.631.097,- atau terealisasi sebesar 90,79% serta belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 1.029.488.615.439,- atau terealisasi sebesar Rp. 937.983.069.666,- atau sebesar 91,11%. Anggaran Belanja langsung tersebar pada 45 Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Jambi dan secara umum telah terealisasi 89,66% dari target belanja langsung.

1.6. Wilayah Administrasi dan Struktur Pemerintah Provinsi Jambi

1.6.1. Wilayah Administrasi

Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Terdapat 138 kecamatan, 1.381 desa dan 168 kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut :

- Kerinci terdiri dari 16 kecamatan, 287 desa dan 2 kelurahan.
- Merangin terdiri dari 24 kecamatan, 207 desa dan 10 kelurahan
- Sarolangun terdiri dari 10 kecamatan, 149 desa dan 9 kelurahan
- Batang Hari terdiri dari 8 kecamatan, 101 desa dan 13 kelurahan
- Muaro Jambi terdiri dari 11 kecamatan, 148 desa dan 5 kelurahan
- Tanjung Jabung Timur terdiri dari 11 kecamatan, 73 desa dan 20 kelurahan
- Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 kecamatan, 104 desa dan 20 kelurahan

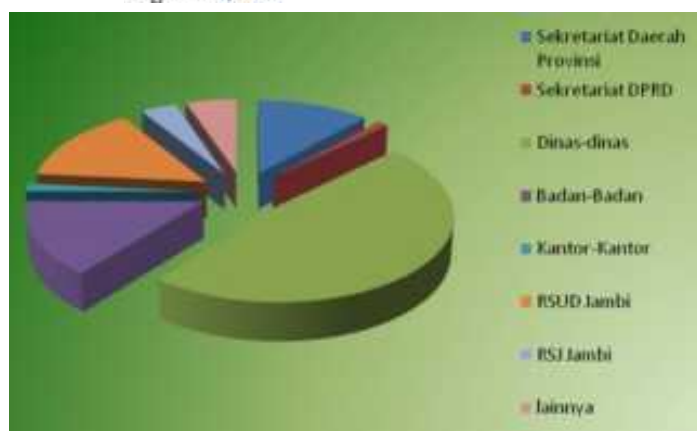


- h. Tebo terdiri dari 12 kecamatan, 107 desa dan 5 kelurahan
- i. Bungo terdiri dari 17 kecamatan, 142 desa dan 12 kelurahan
- j. Kota Jambi terdiri dari 8 kecamatan dan 62 kelurahan
- k. Kota Sungai Penuh terdiri dari 8 kecamatan, 65 desa dan 4 kelurahan

1.6.2. Struktur Pemerintah Provinsi Jambi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dalam wilayah Kantor Gubernur Jambi meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor, rumah sakit, sekretariat KPU dan Korpri. Secara keseluruhan berjumlah 6.365 orang yang terdiri dari 3.512 orang laki-laki (55,18 persen) dan 2.853 orang perempuan (44,82 persen). Ditinjau dari segi golongan kepangkatan terbagi menjadi ; golongan I sebanyak 96 orang (1,51 persen), golongan II sebanyak 1.449 orang (22,77 persen), golongan III sebanyak 4.220 orang (66,30 persen), dan golongan IV 600 (9,43 persen). Secara umum, tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil terbanyak adalah Strata 1 (S1) 2.718 orang (42,70 persen), disusul Sekolah Menengah Atas (SMA) 2.024 orang (32,08 persen), Diploma IV 812 orang (12,76 persen), Pasca Sarjana (S2) 531 orang (8,34 persen), SMP 151 orang (2,37 persen), Sekolah Dasar (SD) 116 orang (1,63 persen), dan Doktor (S3) 7 orang (0,11 persen).

Gambar 1.4. Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Wilayah Kantor Gubernur Jambi menurut Unit Organisasi, 2013



1.7. Isu Strategis Dan Permasalahan Pembangunan

Analisa isu-isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Jambi mempertimbangkan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi di Provinsi Jambi selama pelaksanaan pembangunan, yang merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang juga akan menentukan kinerja pembangunan tahun mendatang.

1.7.1. Infrastruktur Daerah

1. Kualitas infrastruktur transportasi darat terutama jalan yang relatif rendah mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah provinsi Jambi maupun dari provinsi Jambi ke Provinsi tetangga. Pembangunan infrastruktur jalan-jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Provinsi Jambi perlu dilakukan untuk kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran.
Sampai dengan Desember 2014, panjang jalan provinsi Jambi dalam keadaan baik yakni sepanjang 74,82% (1.369,06 Km) dari target sebesar 75% (1.504,92 Km) pada tahun 2015. Ini berarti masih tersisa 0,18% untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2015. Sebagai informasi, panjang jalan provinsi Jambi seluruhnya yakni 1.504,92 Km.
2. Terbatasnya pengembangan akses perhubungan untuk daerah pantai dan pulau terluar di bagian timur Provinsi Jambi, serta masih adanya desa yang belum terjangkau oleh sarana transportasi darat. Serta pembebanan berlebihan (*overloading*) masih terjadi terutama pada lintas Timur dan Barat Sumatera yang melalui Provinsi Jambi.
3. Transportasi sungai, danau dan laut merupakan transportasi tradisional masyarakat Jambi masih belum dimanfaatkan dengan baik. Transportasi ini relatif lebih murah karena mampu mengakomodasi kapasitas angkut yang lebih besar dan biaya perawatan sarana transportasi yang lebih rendah. Transportasi ini dapat dimanfaatkan terutama untuk angkutan barang



seperti hasil tambang dan hasil pertanian dalam arti luas. Revitaliasi transportasi sungai dan laut perlu dilakukan untuk mengembalikan kejayaan transportasi sungai dan laut di Provinsi Jambi. Prasarana perhubungan laut belum tersedia Pelabuhan Internasional, yang ada baru pelabuhan laut antar pulau yang masih relatif kecil.

Namun demikian, pada tahun 2014 ini telah dilakukan berbagai pengembangan kawasan ujung jabung dengan menyiapkan pengembangan luas lahan kawasan pelabuhan sebesar 182 Ha.

4. Prasarana perhubungan udara belum tersedia bandar udara internasional, yang ada hanya dua bandar udara sekunder dan satu bandara udara perintis.

Pada tahun 2014, telah dilakukan pengembangan perluasan dan pembangunan bandara Sultan Thaha Jambi sebagai upaya menuju bandar udara internasional, selanjutnya juga telah diupayakan bandara Sultan Thaha Jambi sebagai bandara antara bagi jema'ah haji provinsi Jambi dan pada awal tahun 2015 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 205 Tahun 2014 tentang penetapan bandara Sultan Thaha Jambi sebagai bandara haji antara.

5. Defisit tenaga listrik yang mencapai 30 MW sehingga pemadaman bergilir harus dilakukan. Pembangkit listrik sebagian besar masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan tenaga diesel dan saat ini hanya tersedia 3 unit pembangkit listrik dengan kapasitas masih dibawah kebutuhan.
6. Sungai Merangin di Kabupaten Kerinci sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan potensi 350 MW belum termanfaatkan secara optimal. Provinsi Jambi butuh listrik 181,07 MW sementara kemampuan hanya 155 MW. Disamping itu dapat mengairi sawah-sawah disekitarnya. Jika dibangun PLTA 350 MW maka kelebihan kapasitas dapat didistribusikan pada daerah yang lain.
7. Kualitas Mutu Air (KMA) yang terdapat pada Sungai Batanghari sudah berada pada tingkat tercemar sedang sampai tercemar berat.
8. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Selain itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padi khususnya sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi.

1.7.2. Sosial Budaya

1.7.2.1. Pendidikan

Permasalahan pokok pendidikan di Provinsi Jambi antara lain :

1. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah serta kesadaran masyarakat untuk bersekolah yang masih relatif rendah.
2. Belum meratanya sebaran pendidikan di kabupaten/kota yang menyebabkan perbedaan APK/APM yang mencolok antara kabupaten dan kota.
3. Banyak jumlah sekolah yang rusak, 53.6% dari total 14.747 ruang kelas SD dan 19.6% dari total 2.260 ruang kelas SMP serta 27.37% dari total 1.030 ruang kelas SMA.
4. Belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan prasarana seperti buku, alat-praktik, alat peraga dan alat-alat laboratorium yang belum memadai.
5. Distribusi guru dan tenaga pendidik yang kurang merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil sesuai dengan standar pelayanan minimal.
6. Belum mantapnya koordinasi antara dinas kabupaten/kota dengan dinas provinsi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.
7. Distribusi tenaga pendidik yang tidak proporsional antar daerah maupun antara sekolah pada daerah yang sama, terutama yang berhubungan dengan tenaga pendidik bagi bidang ilmu tertentu.



8. Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang profesional.

1.7.2.2. Kesehatan

Adapun permasalahan pokok yang dihadapi antara lain ;

1. Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruh lapisan dan strata ekonomi dan sosial masyarakat. Pelayanan kesehatan masih bersifat diskriminatif sehingga menyebabkan disparitas status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender.
2. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi di Provinsi Jambi.
3. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Jambi pada saat ini masih belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sarana, prasarana dan tenaga kesehatan terpusat di Kota Jambi sementara di sebagian besar ibukota Kabupaten tidak memiliki sarana, prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai apalagi di wilayah-wilayah terpencil.
5. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan penyebaran yang tidak merata.
6. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan.
7. Terbatasnya kegiatan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

1.7.2.3. Kebudayaan dan Pariwisata

Beberapa permasalahan bidang kebudayaan antara lain :

1. Besarnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.
2. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur.
3. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional maupun budaya asing yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah.
4. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.
5. Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

1.7.3. Perekonomian Daerah

1.7.3.1. Keuangan Daerah

Fakta dan Permasalahan dari Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Penerimaan PAD Provinsi Jambi masih tergantung pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama yang besarnya pada tahun 2014 mencapai 85 persen dari total penerimaan PAD Provinsi Jambi pada tahun tersebut.
2. Adanya kesenjangan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota yang disebabkan adanya perbedaan karakteristik potensi sumberdaya yang berbeda setiap wilayah. Kabupaten/Kota dengan kapasitas fiskal terbesar adalah Kota Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Bungo, sedangkan kapasitas fiskal terendah di Kabupaten Merangin.



3. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada awal tahun pelaksanaan RPJMD mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan penerimaan dari dana perimbangan masih lebih kecil. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara persentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Provinsi sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.

1.7.3.2. Sumberdaya Ekonomi

1. Menurunnya kinerja ekspor yang antara lain disebabkan biaya ekonomi tinggi; rendahnya infrastruktur ekspor seperti pelabuhan, peti kemas dan angkutan kapal laut serta rendahnya infrastruktur jalan ke pelabuhan; ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah), penurunan ekspor produk kayu olahan dan karena keterbatasan bahan baku, berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor Jambi; masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu seperti Singapura; keragaman ekspor yang masih rendah; lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.
2. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.
3. Rendahnya pendapatan petani yang tercermin dari nilai NTP petani masih dibawah 100 (98,54) tahun 2009. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli petani di Jambi masih rendah karena rendahnya pendapatan.
4. Setiap tahun lahan-lahan potensi tanaman pangan dan hortikultura ada yang beralih (konversi) ke subsektor lain seperti perkebunan sawit, sehingga luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura kecenderungan terjadi penurunan, jika tidak diikuti dengan pembukaan lahan – lahan baru.
5. Rendahnya produktivitas yang umumnya terdapat di daerah rawa/ pasang surut.
6. Terjadinya kesenjangan produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan, ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan pertanian.
7. Masih tingginya desa rawan pangan di Provinsi Jambi.
8. Pola konsumsi masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras).
9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai ideal.
10. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan.
11. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, cold storage, jenis alat tangkap.
12. Rendahnya produktivitas dan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
13. Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif.
14. Tertinggalnya kinerja koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang disebabkan antara lain karena rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.

1.7.3.3. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan.
2. Kemampuan dan keberlanjutan produksi pangan, pertanian, dan perikanan yang akan menghadapi kendala dan keterbatasan dukungan kapasitas sumberdaya alam.
3. Jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih).



4. Rendahnya minat berinvestasi untuk pengusaha mineral dan batubara. Keadaan ini disebabkan masalah kepastian hukum dan belum optimalnya sistem insentif untuk menarik masuknya investor baru dalam usaha pertambangan.
5. Pemanfaatan tambang telah menyisakan permasalahan lingkungan. Reklamasi tambang belum dikelola secara ekologis dan ekonomis, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam, ataupun nonfisik seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Persyaratan lingkungan yang ketat pada tingkat provinsi belum dipersiapkan secara optimal. Di samping itu, pembangunan pertambangan sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya alam belum dilaksanakan, ditata, dan dikembangkan secara terpadu dengan pembangunan wilayah dalam suatu kerangka tata ruang yang terintegrasi.
6. Masih tingginya kawasan hutan berstatus '*open access*' merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. Belum jelasnya tata batas kawasan hutan menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.
7. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air yang tersedia pada musim hujan dan pada musim kemarau, menyebabkan ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan.
8. Tantangan monokultur tanaman tertentu, berpeluang merubah keseimbangan alam dan perubahan ekosistem, berdampak pada bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

1.7.4. Tata Pemerintahan

1.7.4.1. Pemerintahan Umum

1. Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan daerah masih dirasakan minim. Pada tingkat penegakan hukumnya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat
2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya program *Single Identification Number* (SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan negara, terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.
3. Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi pengawas internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat.
4. Di samping permasalahan tersebut di atas, budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi. Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (*code of conduct*) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi



yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Oleh sebab itu pengembangan dan penerapan *e-procurement* merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.

5. Pelayanan Publik. Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa pemerintah Provinsi Jambi belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
6. Para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Provinsi Jambi masih terkendala dengan berbagai regulasi, system pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Oleh karena itu diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan investasi.
7. Sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan.
8. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
9. Pengembangan budaya hukum dan HAM. Meskipun upaya pengembangan budaya hukum dan HAM terus dilakukan secara sinergi antara pemerinrah dan pemerintah provinsi, dan kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, namun kesadaran hukum serta penghormatan terhadap HAM masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

1.8. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKj)

Sistematika penyajian LKj Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah pemerintah Provinsi Jambi, kondisi geografis, data demografi dan kondisi ekonomi daerah. Bab ini juga berisi penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat Pengelolaan Kinerja Daerah, Rencana Strategis Daerah, Tema Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2014, dan Perjanjian Kinerja tahun 2014. Bab ini juga berisi Program-program untuk Pencapaian IKU 2014.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

Berisi penjelasan singkat tentang capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk setiap pernyataan kinerja, capaian IKU tahun 2014, juga Evaluasi dan Analisis Capaian IKU 2014 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan program/kegiatan yang menunjang capaian Kinerja serta capaian Kinerja Keuangan Daerah.

Bab IV : Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah pada masa yang akan datang.